

## **Laporan Hasil Penelitian**

### **Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Komunitas dan Kawasan (Studi Kesenjangan pada Kawasan Terpencil Desa Huku Kecil dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat)**



**Tim Pengusul :**

**Dr. Alce Albartin Sapulette, M.Si.**

**NIP/ NIDN. 1975022005012003/ 2225037501**

**Benico Ritiauw, S.Sos, M.A**

**NIP. 199408272024211001**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

**NOVEMBER 2024**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “Pembangunan Sistem Pendidikan Berbasis Komunitas dan Kawasan (Studi Kesenjangan pada Kawasan Terpencil Desa Huku Kecil dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat)” merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Alce A. Sapulette, M.Si dan Benico Ritiauw, M.A, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Panitia Program Bantuan Penelitian.

Ambon, November 2024

Peneliti



Dr. Alce A. Sapulette (Ketua)  
NIP. 197503242005022003



Benico Ritiauw, M.A (Anggota)  
NIP. 199408272024211001

Mengetahui

Kepala Pusat,  
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)

Ketua Lembaga,  
Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat (LP2M)



Dr. H.J Lesilolo, M.Pd

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Alce A. Sapulette, M.Si

Jabatan : Ketua peneliti

Unit kerja : IAKN Ambon

Alamat : Ambon

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Judul penelitian "**Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Komunitas dan Kawasan (Studi Kesenjangan pada Kawasan Terpencil Desa Huku Kecil dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat)**" merupakan karya orisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian program bantuan DBK selama tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, November 2024

Yang Menyatakan,



Dr. Alce A. Sapulette, M.Si  
NIP.197503242005012003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosiokultural, memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya permasalahan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Permasalahan tersebut antara lain yang terkait dengan pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*), angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang. Sebagai bagian dari NKRI, daerah 3T memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, agar daerah 3T dengan pengembangan model pembelajaran daerah 3T dapat memajukan bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan NKRI.

Kesenjangan pendidikan selalu menjadi masalah mendasar dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Keterbatasan akses dan infrastruktur, ketersediaan sumber daya pendidikan, daya topang ekonomi keluarga, hingga budaya, menjadi sekian dari banyak alasan betapa rentannya instrumentasi pendidikan bagi masyarakat. Gambaran ini sekaligus mempertegas proposisi dasar bahwa pendidikan tidaklah given, melainkan bersifat konstitutif, dibentuk melalui ragam aspek eksternal seperti lingkungan, ekonomi, keluarga, hingga yang paling sublim semisal persahabatan.

Fakta kesenjangan ini telah lama disadari oleh Negara, sekaligus menjadi cikal bakal perumusan sejumlah kebijakan penanggulangan guna memastikan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok desa. Pangkal inovasi kebijakan setidaknya tertuang dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 yang memuat enam kriteria utama kategorisasi daerah tertinggal diantaranya perekonomian masyarakat, sarana-prasaran, dan karakteristik daerah. Ketentuan ini sekaligus menjadi dasar inovasi kebijakan pemerataan pembangunan lintas sektor, termasuk pendidikan. Semangat utamanya sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Semangat itu dioperasionalisasikan dalam misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam dokumen rencana strategis nasional 2020-2024 yakni; Pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kedua, mewujudkan pelestarian dan kemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Misi tersebut selanjutnya diperas menjadi empat tujuan strategis utama Kemendikbud yakni, perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan, dan yang terakhir penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Rumusan ini menjadi kompas bagi Kemendikbud dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Salah satu yang paling banyak dipercahkan yakni upaya peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Kemendikbud menetapkan lima strategi utama guna menjamain ketercapaian arah kebijakan tersebut yakni peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan

pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah, dan peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

Tentunya ketetapan ini dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di satu sisi, dan pemerataan layanan pendidikan di sisi yang lain, yang secara implementatif diupayakan secara simultan dalam banyak program semisal program Guru Penggerak, Aplikasi Ruang Guru, program Indonesia Mengajar, program Gerakan Literasi Sekolah (GLS), yang didesain dengan latar masalah yang sama yakni ketidaksetaraan kualitas sumber daya pendidikan (baik manusia maupun infrastruktur), dan keterbatasan daya jangkau pendidikan hingga ke kawasan 3T.

Beranjak dari situ, terbesit pertanyaan mendasar yakni seberapa luas dan berdampak misi, arah kebijakan dan program strategis pendidikan nasional, bagi komunitas masyarakat terpencil ? Pertanyaan ini dikondisikan sebagai pintu masuk menuju upaya untuk membongkar implementasi program pendidikan nasional, yang secara spesifik menjadi fakta yang dialami oleh komunitas di dua Desa terpencil yakni Huku Kecil dan Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Secara geografis, Kecamatan Elpaputih berjarak sekitar 135 Km dari ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat. Sementara Pusat pemerintahan Kecamatan berada di Desa Elpaputih. Kecamatan ini memiliki 7 desa, dua di antaranya yakni Desa Huku Kecil dan Abio. Kedua Desa ini terletak di kawasan pegunungan dengan kondisi keterisolasian yang cukup besar. Huku Kecil berpenduduk 2.107 jiwa, jumlah yang nyaris sama dengan Desa Abio. Rentang kendali perjalanan menuju ke dua Desa tersebut terbilang sangat rumit.

Akses jalan raya hanya terbatas hanya di Desa Sumeith. Sementara jarak tempuh dari Desa Sumeith ke Desa Huku Kecil yakni sejauh 32 km dan 40 km ke Desa Abio. Dari sisi ketersediaan infrastruktur pendidikan, Desa Abio memilik jenjang pendidikan

Sekolah Dasar yang dikelola oleh Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK), sementara di Desa Huku Kecil terdapat dua jenjang pendidikan yakni SD YPPK dan SMP Negeri 3 Elpaputih. Untuk jenjang Pendidikan menengah dan tinggi, hanya tersedia di kawasan pusat Kecamatan, Kabupaten, maupun ibukota Provinsi. Kerumitan akses terhadap pendidikan tidak berhenti di situ. Ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik juga turut menjadi masalah mendasar. Sebagai contoh, di Desa Abio terdapat sedikitnya 3 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang tenaga honorer. Disebabkan kerumitan akses jalan dan jarak tempuh, para guru seringkali membutuhkan waktu paling lama seminggu untuk kembali melaksanakan tugas, bila sedang bepergian ke pusat Kecamatan maupun Kabupaten. Selama masa itu, kewajiban belajar mengajar diambil alih oleh tenaga honorer yang seluruhnya merupakan warga asli Desa dengan rata-rata tingkat pendidikan hanya lulusan SMA.

Kerumitan yang sama juga tampak melalui sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kondisi sekolah yang tidak memadai serta minimnya bahan pustaka yang diharapkan dapat menjadi suplemen dalam membantu proses belajar mengajar, menjadi kendala dalam upaya transformasi pendidikan yang berdampak pada kualitas manusia. Mengapa situasi ini menjadi genting untuk dibahasakan ? Dibalik arah pembangunan pendidikan yang kini telah banyak mengandalkan teknologi, ternyata masih banyak daerah yang berjibaku, bernegosiasi dengan kerumitan, untuk sekedar mengakses fasilitas dasar pendidikan. Orientasi sistem pendidikan yang lebih mengutamakan input oriented dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan, serta tata kelolah pendidikan yang mengutamakan macro-oriented, yang dominan diatur oleh birokrasi di pusat, tampaknya memberi dampak pada realisasi yang tidak linear pada level mikro (Usman; 2014). Permasalahan infrastruktur, sarana-prasaran, kualifikasi tenaga kependidikan, berkelindan masif dalam lanskap pendidikan nasional, dengan kapasitas dampak yang besar terhadap kualitas peserta didik (Abduh, Basiru, Narayana, Safitri & Fauzi; 2022)

Kerumitan di atas tampaknya membutuhkan pola atau model alternatif dalam upaya untuk menata kelola pendidikan yang terjangkau dan adaptif pada kondisi sosial komunitas warga. Riset ini memikirkan tentang pentingnya pendekatan berbasis komunitas sebagai langkah prefentif, mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar

pendidikan dengan menempatkan jaringan sosial kewargaan sebagai basis utama penopang sistem pendidikan. Tradisi sistem kependidikan menyebutnya sebagai Sekolah alternatif. Sekolah alternatif tidak diartikan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode didaktik baru (Pradipto; 2007). Secara operasional, model jejaring sosial kewargaan ini diaktivasi melalui tiga jenis modalitas sosial yakni Bonding Social Capital, (hubungan kedekatan seperti keluarga atau hubungan antar etnik), Bridging Social Capital (hubungan yang lebih lebih bersifat instrumental seperti rekan bisnis, kenalan, teman dari berbagai kelompok etnis), dan Linking Social Capital (hubungan dengan kelompok formal institusi negara) (Foxton & Jones; 2011, Putnam; 1993).

Kerangka modalitas tersebut membentuk orientasi kolektif kewargaan yang berbasis pada nilai dan norma komunitas, sembari memperkuat ketahanan sosial (*social resilience*) masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. Pada tataran ini, terdapat tiga aspek penting dalam memahami *social resilience* yakni *Coping Capacities*, *Adaptive Capacities* dan *Transformative Capacities*. *Coping Capacities* yang bersifat taktis dan berjangka pendek, diperlukan untuk mengatasi atau menyelesaikan dengan segera ancaman yang sedang berlangsung; dan di saat masyarakat tidak mengalami situasi krisis, *Adaptive Capacities* yang bersifat strategis dan berjangka Panjang, dibutuhkan untuk belajar dari pengalaman krisis dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan resiko di masa mendatang. Sedangkan *Transformative Capacities* atau *Participative Capacities* merupakan tahap tertinggi di mana masyarakat dapat menggerakkan kemampuannya untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan termasuk berelasi dengan berbagai institusi yang berkepentingan baik pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil guna mengatasi krisis atau potensi krisis yang sedang dan akan dialami (Keck & Sakdapolrak ;2013).

Pendayagunaan modal sosial dapat dilihat sebagai upaya untuk mereformasi sistem pendidikan yang selama ini terlalu menekankan karakteristik kebijakan yang *bersifat top-down* dan *direct rules*, tanpa mengantisipasi kemungkinan kepelbagaian kondisi sosial masyarakat dengan corak lokalitas yang spesifik. Pendekatan ini memberi akses bagi masyarakat dan atau komunitas, untuk terlibat aktif dalam giat pembangunan, termasuk

pendidikan. Dengan kata lain, masyarakat tidak diletakan sebagai objek melainkan subjek kebijakan. Tata nilai, norma, kekerabatan, dan pola relasi sosial, berlaku sebagai support system guna mendukung program-program strategis pendidikan.

Dalam kasus masyarakat Desa Huku Kecil dan Abio, terdapat tugas besar yakni memicu kesadaran komunitas warga dalam memandang keterbatasan dan kesenjangan pendidikan sebagai bagian dari krisis. Pendekatan di atas dilihat cukup kapabel digunakan dengan mempertimbangkan aspek kontekstualitas. Kontekstualitas menjadi masalah serius, tidak hanya dalam lanskap kebijakan pemerataan pendidikan, tetapi juga secara lebih teknis ditemukan dalam kurikulum pembelajaran. Kondisi sosial masyarakat terpencil, dengan karakteristik sosial-budaya yang spesifik, sebagaimana di Desa Huku Kecil dan Abio, menjadi prakondisi pentingnya kontekstualitas dalam pendidikan. Hal ini dilakukan agar tradisi pembelajaran jauh lebih adaptif dan aplikatif (Nurchamid; 2021).

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimana jejaring sosial kewargaan terbentuk, diaktivasi dan diterapkan sebagai penopang implementasi sistem pendidikan di Desa Huku Kecil dan Abio ?
2. Bagaimana coping, adaptive, dan transformative masyarakat desa dalam rangka membangun sistem pendidikan komunitas yang berdampak pada transformasi sumber daya manusia ?
3. Bagaimana model pengembangan sistem pendidikan berbasis komunitas dan kawasan di Desa Huku Kecil dan Abio ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dari penelitian ini yakni untuk memahami, menjelaskan, dan merumuskan:

1. Menganalisis pendayagunaan jejaring sosial kewargaan yang terbentuk, diaktivasi dan diterapkan sebagai penopang sistem pendidikan komunitas warga di Desa Huku Kecil dan Abio.

2. Mengkaji coping, adaptive, dan transformative masyarakat desa dalam rangka membangun sistem pendidikan komunitas yang berdampak pada transformasi sumber daya manusia
3. Merumuskan model pengembangan sistem pendidikan berbasis komunitas dan kawasan di Desa Huku Kecil dan Abio guna menemukan pola alternatif yang kapabel dikerjakan dalam mengkerangkai sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif, berbasis komunitas dan kawasan

#### **D. Kajian Terdahulu**

Penelitian yang dilaksanakan untuk melihat pola atau model sistem pendidikan pada kawasan terpencil, sudah pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa hasil riset terdahulu yakni sebagai berikut; *Pertama*, riset yang dilakukan oleh Imam Fitri Rahmadi pada 2020 dengan tema “Pendidikan Di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, Dan Sumber Belajar” penelitian ini kemudian melihat Pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia terkenal dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi siswa, guru, dan sumber belajar pada sekolah di daerah kepulauan Pongok dan Celagen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sangat sedikit lulusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pongok dan Celagen yang melanjutkan ke perguruan tinggi, masih terdapat cukup banyak guru yang berlatar belakang pendidikan strata 1 non-kependidikan, dan hampir tidak ada koleksi buku panduan pendidik di perpustakaan sekolah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Abduh pada 2022 tentang Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor” penelitian melihat Pendidikan di daerah terpencil dihadapkan dengan berbagai masalah yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat terpencil di kampong Manceri, Cigudeg Bogor memandang pentingnya pendidikan dan untuk mengetahui factorfaktor apa yang mempengaruhi rendahnya pendidikan di terpencil di Kampung Manceri, Cigudeg Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling, dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Pandangan masyarakat di Kampung Manceri Cigudeg Bogor terkait pentingnya pendidikan masih sangat rendah, hal ini dibuktikan masih terdapat anak putus sekolah. (2) Yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Kampung Manceri, Cigudeg Bogor adalah: rendahnya kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya pendidikan, karena factor ekonomi, lingkungan dan jarak menuju kesekolah

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Fadillah pada 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Terpencil (Studi Kasus pada SD Inpres Ampiri Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru). Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data Melakukan observasi umum Menentukan fokus dan subjek/informan penelitian Melakukan observasi partisipasi pada siswa dan orang tua siswa Melakukan pengamatan terhadap aktifitas siswa di sekolah dan di lingkungan keluarga siswa Melakukan analisis deskripsi dan pengecekan keabsahan data Melakukan wawancara mendalam yaitu berupa dialog dengan siswa, orang tua siswa, masyarakat sekitar lingkungan siswa dan guru SD Inpres Ampiri. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan hasil Pandangan masyarakat Dusun Ampiri Desa Bacu-bacu terhadap pendidikan belum sepenuhnya baik, itu terlihat dari tingkat kepeduliannya terhadap pendidikan anak yang masih kurang. Masih banyaknya terdapat anak-anak yang tidak menempuh pendidikan. Pola pikir masyarakat di Dusun Ampiri Desa Bacu-bacu yang menjadikan pendidikan bukan sebagai prioritas, masyarakat Dusun Ampiri Desa Bacu- bacu yang lebih menjadikan bekerja untuk menghasilkan uang adalah yang paling penting. Faktor penyebab rendahnya motivasi siswa untuk bersekolah adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan jarak antara rumah ke sekolah, sedangkan faktor pendukung adalah guru dan partisipasi pemerintah

*Keempat*, Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal merupakan daerah yang paling terluar pada wilayah Indonesia, pada dasarnya ada 122 wilayah di Indonesia yang masuk dalam wilayah 3T salah satunya adalah Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam daerah studi Ibu Kota Kabupaten Mahakam Hulu yaitu Ujoh Bilang,

permasalahan yang terjadi ialah sangat jauh kepedalaman hutan Kalimantan dan cukup terisolir hanya dapat melalui jalur sungai karena belum ada jalur darat yang layak. Sistem pendidikan yang rata-rata masih minim, infrastruktur sekedarnya, minimnya jumlah tenaga pendidik yang memadai dan juga kualitas guru yang masih rata-rata lulusan sekolah menengah keatas atau sederajat, sehingga untuk tenaga terdidik khususnya sarjana pendidikan masih sangat minim.

Penelitian ini menggunakan metodologi Research and Development (R&D). Dalam Objek penelitian ini ialah pembentukan dan penerapan Forum Komunitas Guru (FKG 3T) terhadap pengajaran pada beberapa sekolah dalam studi penelitian. Selama penelitian berlangsung metode pembelajaran yang dilaksanakan berdeda pada tiap masing-masing sekolah seperti SDN 001 Ujoh Bilang metode normative, SMPN 001 Ujoh Bilang metode deskriptif dan SMUN 001 Ujoh Bilang metode hermeneutis. Hasil yang diperoleh ialah meningkatnya kualitas pendidikan dalam waktu ke waktu khususnya dalam pencapaian nilai cukup baik pada beberapa mata pelajaran di sekolah dan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan dalam jumlah tenaga pendidikan berkualitas yang berada pada daerah 3T.

Kempat penelitian terdahulu diatas menunjukan perbedaan dalam melihat persoalan pendidikan dengan menggunakan variable, metode, hingga konklusi yang menekankan peran penting pemerintah sebagai aktor utama dalam penanganan pendidikan di kawasan terpencil. Berbeda dengan itu, riset ini hendak menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan yang dialami oleh komunitas warga di kawasan terpencil. Keterbatasan akses dan jangkauan, serta keterisolasian, menjadi prakondisi bagi pentingnya memikirkan kembali daya partisipasi komunitas dalam mendukung ragam program pendidikan. Komunitas dilibatkan sebagai subjek penting dalam setiap upaya dan giat pengembangan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan kontekstual, dengan mengandalkan kekuatan kewargaan berbasis komunitas dan kawasan.